

Analisis Efektivitas Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung

Mentari Puteri Pertiwi¹; Risma Cahya Maudi²

Universitas Winaya Mukti, Indonesia^{1,2}

ABSTRACT

The implementation of the State Treasury and Budget System is a government initiative to improve the effectiveness, transparency, and accountability of public financial management. This research aims to analyze the effectiveness of the system in the issuance process of Fund Disbursement Orders at the State Treasury Service Office Bandung I. The study employed a descriptive qualitative method through observation, interviews, participation in work activities, and documentation review during the internship. The results indicate that the State Treasury and Budget System has supported faster fund disbursement, improved data accuracy, and strengthened internal control. However, several administrative issues, such as incorrect bank account information and incomplete supporting documents submitted by government work units, still caused delays in the issuance of Fund Disbursement Orders. It can be concluded that the implementation of the State Treasury and Budget System has been effective. Nevertheless, greater administrative accuracy, better coordination, and stronger user compliance are still required to optimize the quality of public financial management services.

ABSTRAK

Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sistem tersebut dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, partisipasi dalam kegiatan kerja, dan telaah dokumentasi selama pelaksanaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara telah mendukung percepatan pencairan dana, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat pengendalian internal. Namun, masih ditemukan kendala administratif, seperti kesalahan data rekening dan ketidaklengkapan dokumen dari satuan kerja, yang menyebabkan keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. Dengan demikian, penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara telah berjalan efektif, namun peningkatan ketelitian administrasi, koordinasi, dan kepatuhan pengguna tetap diperlukan untuk mengoptimalkan kualitas layanan pengelolaan keuangan negara.

ARTICLE HISTORY

Received : 19-08-2026

Revised : 15-09-2026

Accepted : 24-09-2026

KEYWORDS

Efektivitas Pengelolaan
Keuangan Negara
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
Surat Perintah Pencairan Dana

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk proses pembayaran dan pencairan dana. Dalam kerangka pelaksanaan pembayaran APBN, penelitian dan pengujian terhadap data/informasi SPM dilakukan secara elektronik; apabila SPM memenuhi ketentuan, KPPN menerbitkan SP2D, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan, SPM ditolak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Penerapan sistem terintegrasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses, akurasi data, transparansi, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara.

Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, SPAN dimanfaatkan dalam tahapan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM), validasi data, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Efektivitas sistem pada tahap tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga dengan kualitas informasi, kompetensi pengguna, kualitas layanan, serta kesiapan infrastruktur. Penelitian mengenai implementasi SPAN menunjukkan bahwa penggunaan sistem berkaitan dengan kinerja pegawai dan dipengaruhi oleh kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi (Setyawan & Prawati, 2022). Penelitian pada SAKTI sebagai sistem yang terintegrasi dengan ekosistem perbendaharaan juga menunjukkan bahwa kualitas informasi dan layanan, kompetensi pengguna, serta stabilitas konektivitas berperan dalam keberhasilan implementasi sistem keuangan pemerintah (Hartiwi & Rokhayati, 2023; Nursanto et al., 2026). Oleh karena itu, efektivitas SPAN dalam penerbitan SP2D perlu dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan antara kinerja sistem dan faktor administratif serta sumber daya pengguna.

Kajian penelitian tersebut menunjukkan adanya manfaat digitalisasi, tetapi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada pengguna, kualitas informasi, dan infrastruktur. Berdasarkan penelitian yang ditinjau, belum banyak kajian yang memusatkan perhatian pada efektivitas SPAN dalam alur penerbitan SP2D di KPPN Bandung I dengan menghubungkan kinerja verifikasi elektronik dan penyebab retur SPM. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memeriksa proses penerbitan SP2D secara operasional serta mengidentifikasi faktor administratif, sumber daya manusia, dan teknologi yang memengaruhi kelancaran proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SPAN dalam proses penerbitan SP2D di KPPN Bandung I serta mengidentifikasi faktor administratif, sumber daya manusia, dan teknologi yang memengaruhi kelancaran proses tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mengintegrasikan proses perbendaharaan dan penganggaran. Dalam pelaksanaan pembayaran APBN, PMK Nomor 210/PMK.05/2022 menegaskan bahwa penelitian dan pengujian SPM dilakukan secara elektronik dan menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan atau menolak SP2D. Dengan demikian, efektivitas SPAN dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan sistem dan proses yang terintegrasi untuk mendukung penerbitan SP2D secara tepat, akurat, transparan, dan sesuai ketentuan. Selain aspek sistem, efektivitas juga dipengaruhi oleh kualitas informasi dan kondisi pengguna. Setyawan dan Prawati (2022) menunjukkan bahwa implementasi SPAN berkaitan dengan kinerja pegawai, sedangkan Hartiwi dan Rokhayati (2023) menemukan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna SAKTI.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah bersifat multidimensional. Hasanah dan Sriyani (2021) menunjukkan bahwa implementasi SAKTI pada KPPN Palembang dapat berjalan baik, tetapi kompetensi operator tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Setyawan dan Prawati (2022) menemukan adanya hubungan antara implementasi SPAN dan kinerja pegawai, terutama melalui

kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi. Rahman et al. (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi SAKTI pada KPPN Semarang I memerlukan perhatian terhadap proses penggunaan dan kesiapan pengguna. Hartiwi dan Rokhayati (2023) menegaskan pentingnya kualitas informasi dan layanan dalam membentuk kepuasan pengguna sistem keuangan. Nugroho et al. (2018) secara lebih spesifik menganalisis SPAN dalam proses pencairan dana APBN pada KPPN Jakarta II, sehingga dapat menjadi pembanding mengenai penerapan SPAN pada proses pencairan dana di KPPN. Penelitian yang lebih mutakhir oleh Nursanto et al. (2026) menunjukkan bahwa SAKTI meningkatkan standarisasi dan keterlacakan transaksi, tetapi masih menghadapi kendala konektivitas, perlambatan sistem pada periode tertentu, pelatihan pengguna, dan literasi digital. Anwar et al. (2026) juga menemukan bahwa OMSPAN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi keterbatasan jaringan dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala.

Meskipun demikian, studi-studi tersebut umumnya berfokus pada implementasi SAKTI, penggunaan SPAN secara umum, atau pemanfaatan OMSPAN untuk monitoring. Studi yang secara khusus mengkaji efektivitas SPAN pada alur operasional penerbitan SP2D di KPPN Bandung I, termasuk kaitan antara verifikasi elektronik, penyebab retur SPM, kompetensi pengguna, dan kendala infrastruktur, masih terbatas dalam literatur yang ditinjau. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menganalisis efektivitas SPAN dalam proses penerbitan SP2D di KPPN Bandung I berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sistem berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan selama kegiatan penelitian. Penelitian dilaksanakan pada KPPN Bandung I selama periode penelitian yang menjadi dasar penyusunan artikel.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan partisipasi peneliti dalam kegiatan kerja yang berkaitan dengan proses pencairan dana. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif karena peneliti terlibat dalam kegiatan kerja sekaligus mengamati alur dan pelaksanaan proses penerbitan SP2D. Penggunaan observasi partisipatif dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai aktivitas yang diamati (Creswell & Poth, 2018). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, dokumen internal, serta literatur yang berkaitan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang tetap, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan kendala yang ditemui dalam proses penerbitan SP2D (Creswell & Poth, 2018). Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) terlibat langsung dalam proses penelitian, pengujian, atau penerbitan SP2D; (2) memahami penggunaan SPAN/SAKTI dalam proses pembayaran; dan (3) memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai kendala pengajuan dan pemrosesan SPM. Wawancara dilakukan kepada Bapak Agus Harianto sebagai staf keuangan. Pemilihan informan secara purposive didasarkan pada pertimbangan bahwa informan dipilih karena memiliki informasi yang relevan dan mendalam

dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil observasi melalui dokumen dan arsip yang tersedia.

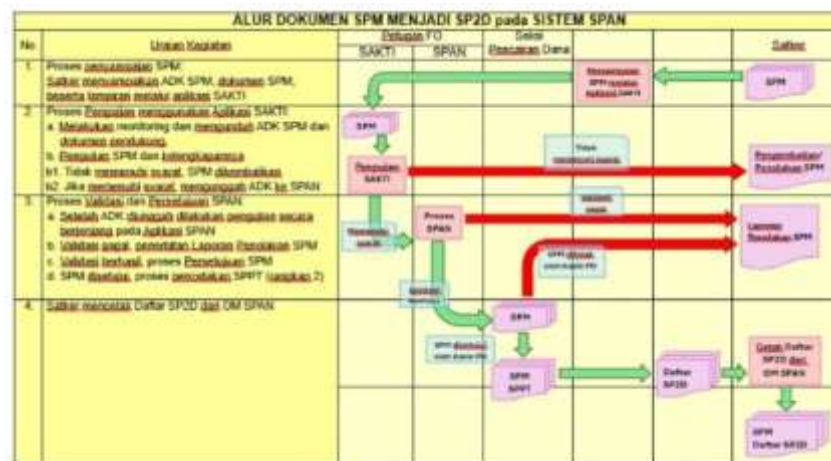
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan secara naratif dan dalam bentuk matriks penilaian, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Untuk menjawab penilaian efektivitas pada Tabel 1, penelitian menggunakan rubrik skoring kualitatif yang disusun berdasarkan pemenuhan indikator efektivitas hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skor 4 dikategorikan "Sangat Baik" apabila indikator terpenuhi secara konsisten dan didukung oleh ketiga sumber data; skor 3 dikategorikan "Baik" apabila indikator terpenuhi dan hanya terdapat kendala minor; skor 2 dikategorikan "Perlu Perbaikan" apabila indikator belum terpenuhi secara konsisten dan ditemukan kendala yang memengaruhi proses; sedangkan skor 1 dikategorikan "Tidak Efektif" apabila indikator tidak terpenuhi dan kendala menghambat proses secara material. Skoring tersebut merupakan alat bantu interpretasi data kualitatif, bukan uji statistik. Dengan demikian, penetapan kategori pada Tabel 1 didasarkan pada triangulasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis tidak menggunakan uji statistik maupun uji korelasi, melainkan berfokus pada interpretasi data untuk menjelaskan efektivitas penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, penerapan SPAN telah mendukung proses penerbitan SP2D melalui verifikasi SPM, validasi data, dan persetujuan secara terintegrasi. Penggunaan sistem memungkinkan data transaksi ditelusuri secara elektronik dan membantu mengurangi kesalahan manual. Temuan ini sejalan dengan Setyawan dan Prawati (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi SPAN berkaitan dengan peningkatan kinerja melalui penggunaan teknologi yang didukung kondisi fasilitas yang memadai. Dalam konteks penelitian ini, manfaat tersebut terlihat terutama pada keteraturan alur verifikasi dan keterlacakan transaksi.

Hasil observasi terhadap aktivitas pengelolaan dokumen, verifikasi administrasi, penyusunan laporan, dan penggunaan aplikasi menunjukkan bahwa SPAN mendukung pelayanan perbendaharaan yang lebih terdokumentasi dan terstandarisasi. Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kecepatan sistem tidak otomatis menghasilkan penerbitan SP2D yang cepat apabila dokumen dan data yang diajukan satuan kerja belum memenuhi persyaratan.

Untuk memperjelas alur pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maka penulis akan menyajikan flowchart proses penerbitan SP2D melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Alir Proses Penerbitan SP2D

Sumber : KPPN Bandung I

Berdasarkan diagram alir, proses penerbitan SP2D melalui SPAN melibatkan satuan kerja, aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan KPPN Bandung I melalui Seksi Pencairan Dana. Alur tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas pengajuan pada sisi satuan kerja dan proses penelitian serta pengujian pada sisi KPPN. Hal ini penting karena efektivitas sistem pada tahap akhir sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang masuk ke dalam sistem.

Proses penerbitan SP2D diawali dengan pengajuan SPM oleh satuan kerja melalui aplikasi SAKTI beserta dokumen pendukung sesuai jenis pembayaran. Selanjutnya dilakukan penelitian dan pengujian administratif untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Apabila persyaratan belum terpenuhi, SPM dikembalikan kepada satuan kerja untuk diperbaiki. Apabila persyaratan terpenuhi, data SPM diteruskan ke SPAN untuk validasi. Pada tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian data, antara lain kode akun belanja, nilai pembayaran, dan data rekening penerima. Jika ditemukan ketidaksesuaian, SPM ditolak atau dikembalikan untuk diperbaiki; apabila memenuhi ketentuan, KPPN menerbitkan SP2D. Alur tersebut sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 yang mengatur penelitian dan pengujian secara elektronik sebelum penerbitan SP2D.

Pada tahap validasi, Seksi Pencairan Dana melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data, antara lain akun belanja, jumlah dana, dan data rekening penerima. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Surat Perintah Membayar ditolak dan dikembalikan kepada satuan kerja untuk diperbaiki. Namun, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, Kepala Seksi Pencairan Dana memberikan persetujuan sehingga sistem dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Setelah diterbitkan, satuan kerja dapat memantau dan mencetak daftar Surat Perintah Pencairan Dana melalui aplikasi Online Monitoring SPAN sebagai bukti bahwa proses pencairan dana telah selesai.

Untuk memberikan gambaran mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pembayaran APBN, berikut disajikan contoh Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SPM merupakan dokumen yang diajukan satuan kerja sebagai dasar permintaan pembayaran, sedangkan SP2D diterbitkan KPPN setelah SPM memenuhi persyaratan dan melalui proses penelitian, pengujian, serta persetujuan sesuai ketentuan.



Gambar 2. Contoh Surat Perintah Membayar (SPM)
Sumber : KPPN Bandung I



Gambar 3. Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Sumber : KPPN Bandung I

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala administratif yang berasal dari ketidaklengkapan dokumen maupun ketidaksesuaian data yang diajukan oleh satuan kerja. Untuk memberikan gambaran mengenai hasil analisis terhadap penerapan sistem tersebut, penulis menyajikan ringkasan hasil observasi pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

No.	Aspek	Hasil Pengamatan	Keterangan
1	Kecepatan Pelayanan	Proses verifikasi dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.	Skor 3 – Baik
2	Akurasi Data	Validasi sistem membantu mengurangi kesalahan input.	Skor 3 – Baik

3	Transparansi	Transaksi tercatat dan dapat ditelusuri melalui sistem.	Skor 4 – Sangat Baik
4	Pengendalian	Verifikasi dilakukan secara berjenjang.	Skor 3 – Baik
5	Kualitas Dokumen	Dokumen satuan kerja masih ditemukan tidak lengkap atau tidak sesuai sehingga SPM diretur.	Skor 2 – Perlu Perbaikan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan rubrik skoring pada bagian metode, hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek transparansi memperoleh skor tertinggi (4) dengan kategori “Sangat Baik”. Kecepatan pelayanan, akurasi data, dan pengendalian memperoleh skor 3 dengan kategori “Baik”. Sementara itu, kualitas dokumen memperoleh skor 2 dengan kategori “Perlu Perbaikan”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SPAN pada proses penerbitan SP2D relatif baik dari sisi sistem dan pengendalian, tetapi masih dipengaruhi oleh kualitas input dari satuan kerja.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan SPAN memberikan dampak positif terhadap proses penerbitan SP2D di KPPN Bandung I. Sistem membantu mempercepat penelitian dan pengujian dokumen karena tahapan dilakukan secara terintegrasi. Validasi elektronik juga membantu meningkatkan ketepatan data dan keterlacakan transaksi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Setyawan dan Prawati (2022) yang menunjukkan manfaat implementasi SPAN terhadap kinerja pengguna. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa manfaat sistem lebih bersifat sebagai enabler: sistem dapat mempercepat proses yang datanya sudah benar, tetapi tidak dapat menghilangkan hambatan yang berasal dari kualitas pengajuan SPM.

Namun, permasalahan utama berasal dari kualitas pengajuan SPM oleh satuan kerja. Masih dijumpai SPM yang dikembalikan karena kesalahan kode akun belanja, ketidaktepatan nomor rekening penerima, perbedaan nominal antara dokumen pendukung dan data dalam sistem, serta dokumen yang belum lengkap. Kondisi ini menyebabkan proses penelitian dan pengujian harus diulang sehingga penerbitan SP2D tertunda. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Hasanah dan Sriyani (2021) mengenai pentingnya kompetensi pengguna dalam implementasi sistem keuangan pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas input merupakan bagian penting dari efektivitas sistem pada level transaksi.

Selain faktor dokumen, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. Tidak semua operator satuan kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur dan fitur aplikasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kesalahan administratif. Temuan tersebut sejalan dengan Hartiwi dan Rokhayati (2023) yang menunjukkan pentingnya kualitas informasi dan layanan bagi keberhasilan penggunaan sistem, serta Nursanto et al. (2026) yang mengidentifikasi keterbatasan pelatihan dan literasi digital sebagai tantangan dalam implementasi SAKTI. Dengan demikian, pembinaan pengguna perlu dipandang sebagai bagian dari pengendalian proses, bukan sekadar kegiatan pendukung.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan ketergantungan pada sistem elektronik dan jaringan pendukung. Gangguan teknis atau perlambatan sistem dapat menghambat proses ketika transaksi harus diproses dalam jumlah besar. Temuan ini sejalan dengan Nursanto et al. (2026) yang mencatat adanya kendala konektivitas dan perlambatan sistem pada periode tertentu. Pada sisi lain, penelitian Anwar et al. (2026) mengenai OMSPAN juga menunjukkan bahwa keterbatasan

jaringan dan kapasitas SDM dapat mengurangi optimalisasi pemanfaatan sistem. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan dampak kendala tersebut secara lebih spesifik pada tahapan penerbitan SP2D, yaitu ketika proses verifikasi dan validasi harus selesai sebelum dana dapat dicairkan.

Berdasarkan analisis tersebut, permasalahan dalam proses penerbitan SP2D melalui SPAN di KPPN Bandung I lebih dominan berasal dari faktor non-teknis, khususnya kualitas dokumen SPM dan kompetensi pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas SPAN merupakan hasil interaksi antara kualitas sistem, kualitas informasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan kapasitas pengguna. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas tidak cukup dilakukan melalui pengembangan teknologi, tetapi perlu disertai penguatan pemeriksaan awal pada satuan kerja, pembinaan operator, dan koordinasi yang konsisten antara KPPN dan satuan kerja.

Secara kritis, hasil penelitian ini memperluas temuan penelitian terdahulu. Setyawan dan Prawati (2022) menempatkan penggunaan dan kondisi fasilitas teknologi sebagai faktor yang berkaitan dengan kinerja pegawai, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pada level proses SP2D, kualitas dokumen dan kompetensi pengguna menjadi titik kritis sebelum manfaat teknologi dapat diwujudkan. Hasil penelitian Rahman et al. (2023) mengenai implementasi SAKTI pada KPPN Semarang I juga relevan karena menunjukkan pentingnya kesiapan pengguna dalam penerapan sistem. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan hubungan antara fungsi verifikasi elektronik SPAN dan faktor non-teknis yang memengaruhi kelancaran penerbitan SP2D di KPPN Bandung I.

Secara keseluruhan, penerapan SPAN di KPPN Bandung I telah mendukung pelayanan perbendaharaan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan terdokumentasi. Akan tetapi, efektivitas tersebut bersifat kondisional: manfaat sistem paling optimal ketika data, dokumen, pengguna, dan infrastruktur pendukung berada dalam kondisi siap. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan kualitas pemeriksaan SPM sebelum pengajuan, pembinaan dan penyegaran kompetensi operator satuan kerja, penguatan koordinasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I secara umum telah berjalan efektif. Berdasarkan rubrik penilaian kualitatif, aspek transparansi memperoleh kategori "Sangat Baik", sedangkan kecepatan pelayanan, akurasi data, dan pengendalian berada pada kategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa SPAN mampu mendukung proses pengajuan, verifikasi, validasi, hingga penerbitan SP2D secara sistematis, transparan, dan terkontrol.

Penggunaan SPAN memberikan dampak positif terhadap peningkatan kecepatan, akurasi, serta akuntabilitas pencairan dana APBN. Proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara elektronik dapat meminimalkan kesalahan manual serta meningkatkan keterlacakan transaksi. Namun demikian, efektivitas penerapan SPAN belum sepenuhnya optimal karena aspek kualitas dokumen memperoleh kategori "Perlu Perbaikan". Kendala yang ditemukan meliputi kesalahan administratif dalam pengajuan SPM oleh satuan kerja, keterbatasan pemahaman operator terhadap sistem, serta potensi gangguan teknis pada aplikasi dan jaringan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan SPAN dalam penerbitan SP2D tidak hanya ditentukan

oleh kemampuan teknologi sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas dokumen pendukung, kepatuhan terhadap prosedur, serta sinergi antara KPPN dan satuan kerja. Perbaikan pemeriksaan awal SPM, pembinaan operator, dan penguatan koordinasi diperlukan agar manfaat SPAN dapat dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., Aini, N., & Pawane, R. (2026). Efektivitas penggunaan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dalam pengelolaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tolikara. *Jurnal Lapago Society*, 5(2), 61–71. <https://doi.org/10.61578/jls.5.2.61-71>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hartiwi, L. I. A. I., & Rokhayati, H. (2023). Analisis kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi satuan kerja. *Jurnal Manajemen*, 20(1), 18–37. <https://doi.org/10.25170/jm.v20i1.4457>
- Hasanah, N., & Sriyani, S. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di masa pandemi Covid-19 pada KPPN Palembang. *Journal Publicuho*, 4(3), 886–912. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20116>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nugroho, Y. P., Basuki, B., & Fanani, Z. (2018). Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam proses pencairan dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 67–80. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1975>
- Nursanto, G., Pujonggo, S., Hamdi, M. A., Wirdhiningsih, V., & Febrianto, A. (2026). E-government and Public Financial Management reform: An examination of SAKTI implementation. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 19(2), 1567–1576. <https://doi.org/10.35508/jom.v19i2.26226>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901>
- Setyawan, M. H., & Prawati, L. D. (2022). Dampak implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara terhadap kinerja pegawai: Pengujian model unified theory of acceptance and use of technology generasi ketiga. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(1), 49–71. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i1.419>